

BAB I

PENDAHULUAN

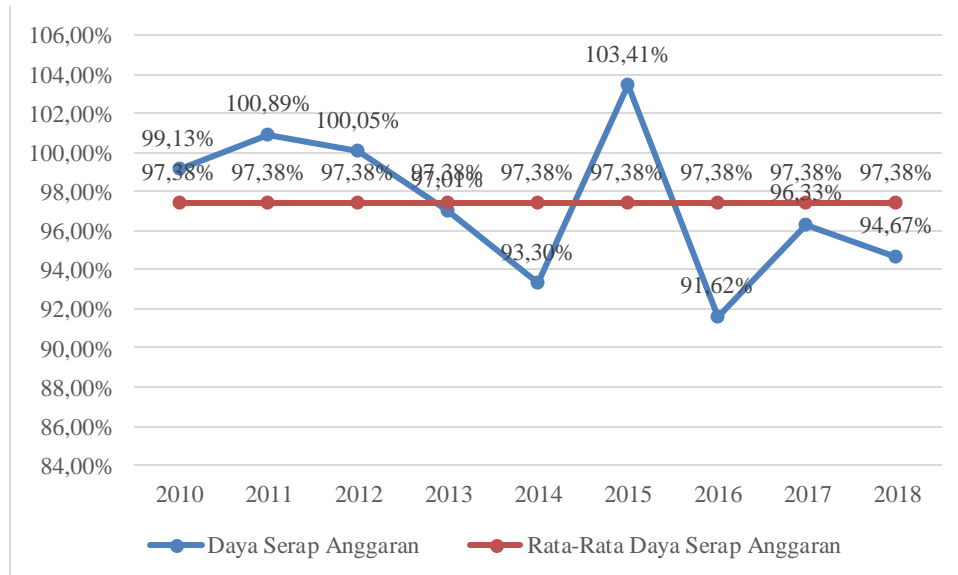
A. Latar Belakang

Instrumen akuntabilitas dari pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang menggunakan dana publik yaitu anggaran. Akuntabilitas publik dapat tercipta melalui sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Anggaran daerah memiliki posisi yang penting dalam peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama mengenai kebijakan fiskal pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan daya serap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Daya serap anggaran yang maksimal berimplikasi pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang terjadi pada setiap tahunnya di Indonesia yaitu mengenai daya serap anggaran. Daya serap anggaran dalam suatu organisasi akan meningkat apabila dalam satu periode penganggaran, melaksanakan program yang telah direncanakan.

Realisasi anggaran tercantum di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Terdapat dua sudut pandang dalam pembahasan mengenai tingkat daya serap anggaran belanja daerah. Pandangan tersebut yaitu perbandingan mengenai realisasi anggaran akhir tahun yang dibandingkan dengan anggaran, dan tidak proporsionalitasnya daya serap anggaran. Hilangnya manfaat belanja merupakan

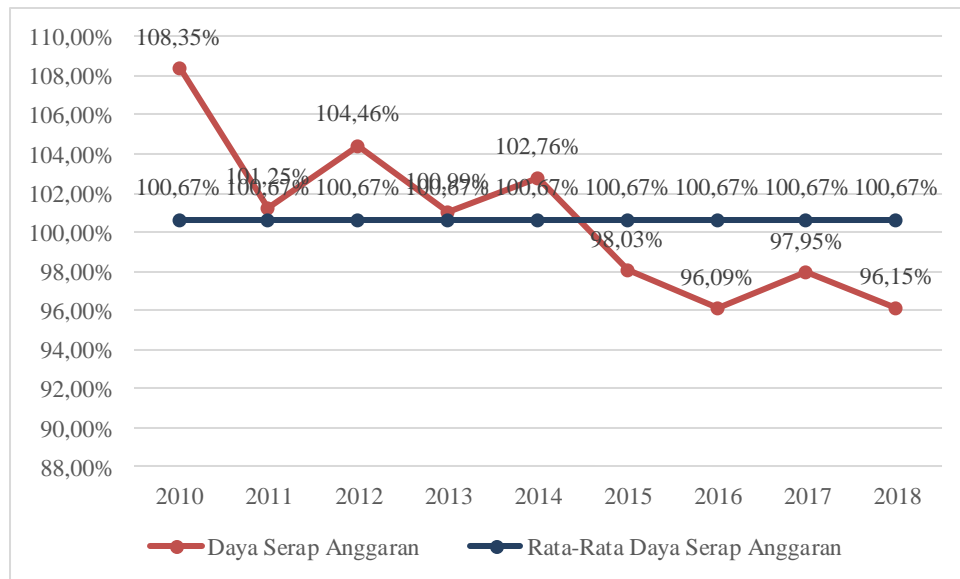
implikasi dari kegagalan target daya serap anggaran, sehingga terjadi idle money karena dana yang dialokasikan tidak seluruhnya dimanfaatkan (Halim, 2014).



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Portal Data APBD

Gambar 1.1 Trend Daya Serap Anggaran Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2010-2018 (%)

Berdasarkan dengan data anggaran dan realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia selama periode tahun 2010-2018 (gambar 1.1) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010-2018 daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia, pada tahun 2015 menjadi posisi tertinggi dengan daya serap sebesar 103,41%. Daya serap anggaran belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 91,62%. Rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia pada tahun 2010-2018 adalah 97,38%.

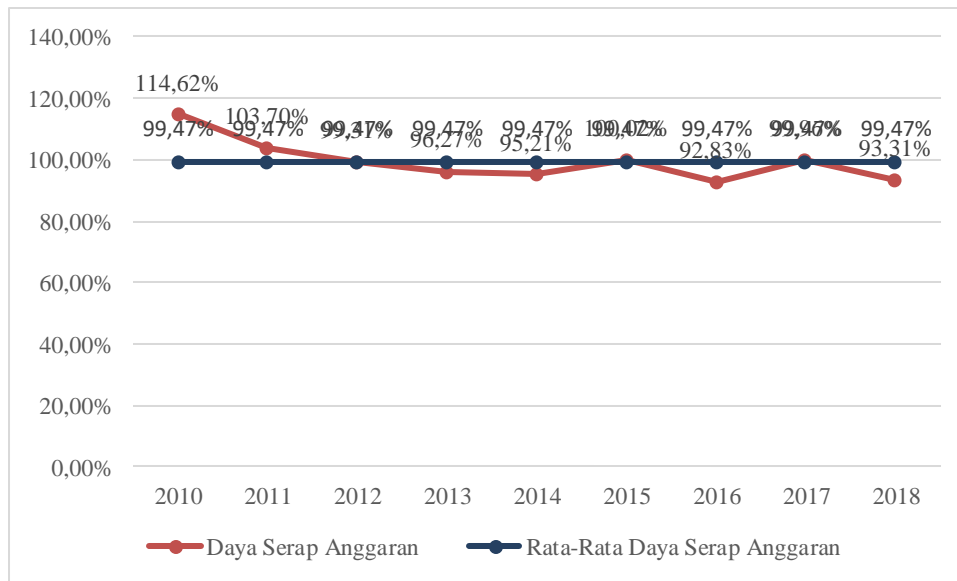


Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Portal Data APBD

Gambar 1.2 Trend Daya Serap Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018 (%)

Berdasarkan gambar 1.2, Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2010-2018 mengalami trend daya serap anggaran belanja daerah yang fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga 2014 tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur berada diatas 100%. Daya serap tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 108,35%. Mulai tahun 2015 sampai 2018 tingkat daya serap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur dibawah 100%.

Persentase tingkat daya serap anggaran belanja terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 96,09%. Pada tahun 2010-2018 memiliki rata-rata daya serap anggaran belanja daerah sebesar 100,67%. Menggambarkan rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia tahun 2010-2018 (gambar 1.1) yang hanya sebesar 97,38%.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Portal Data APBD

Gambar 1.3 Trend Daya Serap Anggaran Belanja Daerah di Kota Malang Tahun 2010-2018 (%)

Pada gambar 1.3, Kota Malang pada tahun 2010-2018 memiliki trend daya serap anggaran belanja daerah yang fluktuatif. Tahun 2010 merupakan tingkat daya serap anggaran belanja daerah tertinggi dengan 114,62%. Pada tahun 2010, 2011, dan 2015 tingkat daya serap belanja daerah melebihi 100%. Sedangkan tingkat daya serap anggaran belanja daerah dengan presentase 92,83% pada tahun 2016 menjadi persentase terendah dari tahun 2010 sampai 2018.

Kota Malang tahun 2010-2018 memiliki rata-rata daya serap anggaran belanja daerah sebesar 99,47%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 (gambar 1.2) sebesar 100,67% maka rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang tahun 2010-2018 berada dibawah rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018.

Faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cerminan dari belanja daerah, yang wajib direncanakan dengan baik. Pada faktor perencanaan, melalui perencanaan anggaran yang baik maka akan memudahkan dalam tahap implementasi serta target dapat dicapai secara efektif (Mahmudi, 2010).

Underfinancing atau overfinancing yang muncul akibat dari lemahnya perencanaan pengeluaran akan berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rendahnya kapabilitas program kerja yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki masalah utama underfinancing. Sedangkan efisiensi yang rendah merupakan masalah yang dihadapi oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menikmati overfinancing (Mardiasmo, 2002).

Proses pengadaan barang dan jasa yang terhambat akan berimplikasi pada pencapaian target daya serap anggaran belanja daerah. Dalam faktor sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang berkualitas maka akan memudahkan dalam mencapai target daya serap anggaran belanja daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010-2018?

2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap persepsi daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus maka peneliti membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang dan menggunakan laporan realisasi anggaran belanja daerah di Kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap persepsi daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang.